

***BONUM COMMUNE* SEBAGAI SASARAN GERAKAN BURUH MENURUT AJARAN SOSIAL GEREJA**

Largus G. Nadeak*

Abstract

The labourers' numbers have increased in line with the development of industrialization. But this development did not parallel to the appreciation on the fruit of the labourers' work. Since long labourers become the object of work and violence. Church social teaching has anticipated labourers' problem since the year 1891 through the Encyclical letter "*Rerum Novarum*". It's main point is that man is *homo laborans*. When human put in on the job, they will fulfil their needs and also form their self-integrity. Therefore men's/women's job must be paid in a proper payment in accordance to the fruit of their work and ability of enterprise. Communion secure and prosperous should be the aim of this movement. *Bonum Commune* gives assurance to the rights of every human as individual, and right of every human in the certain social communities. The church social teaching should be the light on the labourers' movement to make a change in an injustice toward *bonum commune*.

Kata-kata kunci: '*Bonum commune*', buruh, solidaritas, organisasi buruh, upah, pengusaha, hasil produksi, keadilan sosial.

Pendahuluan

"Upah Buruh Harus Naik"¹ adalah satu judul artikel Kompas 13 Januari 2002 yang menyimpulkan jajak pendapat para responden pendukung tuntutan buruh untuk hidup layak. Tuntutan ini tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, karena isi tuntutan ini menyentuh hal yang mendasar dalam hidup. Bukan hanya hak hidup bersifat azasi, tetapi juga hak untuk hidup layak sesuai dengan apa yang dikerjakan seseorang. Maka tuntutan kenaikan upah, agar buruh dapat hidup layak adalah bagian dari tuntutan hak azasi manusia.

Cara yang sering dipakai oleh buruh untuk menuntut haknya adalah mengadakan unjuk rasa dan pemogokan di tempat-tempat strategis, misalnya di tempat kerja, di kantor depnaker dan di gedung perwakilan rakyat. Gerakan buruh yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya justru bisa menimbulkan masalah baru, yang mengarah pada kekerasan dengan merusak sarana umum dan milik orang lain.² Tujuan mulia gerakan buruh agar hak setiap

*Largus G. Nadeak, *Lisensiat Teologi Moral* lulusan Akademi Alfonsianum – Roma, dosen moral pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas Sumatera Utara.

¹B.I. PURWANTARI, "Jajak Pendapat 'Kompas', Upah Buruh Harus Naik", *Kompas* (13 Januari 2002) 31.

²M. SYAIFULLAH – M. NASIR, "Ketika Buruh Bandung Melawan", *Kompas* (22 Juni 2002) 35.

orang dihormati, kalau dilaksanakan dengan kurang tepat, malah akan dilecehkan.

Gerakan buruh demi perbaikan hidup tersebut sebenarnya tidak boleh lepas dari komitmen bersama dalam mencapai kesejahteraan umum (*bonum commune*). Kesejahteraan buruh merupakan tanggungjawab semua pihak seperti buruh itu sendiri, pengusaha, pemerintah dan masyarakat.

Bagaimana sikap Gereja terhadap gerakan seperti di atas? Jawabannya dapat kita lihat dalam ajaran sosial Gereja, misalnya ensiklik *Rerum Novarum*. Ensiklik yang sudah berumur seratus sepuluh tahun ini memberikan jawaban yang cukup memadai terhadap gerakan buruh masa kini, namun pendapat tersebut tampaknya kurang populer, terutama dikalangan orang katolik sendiri. Akibatnya ajaran tersebut tidak menyentuh masalah aktual, demikian dikatakan oleh Aloysius Pieres.³ Namun Gregory Baum mengajak kita untuk kembali lagi mencermati realitas hidup kita dalam terang ajaran sosial Gereja. “*Catholic social teaching constitutes an original intellectual tradition that makes important contributions to the contemporary debate*”.⁴

Ajaran sosial Gereja mempromosikan *bonum commune* sebagai sasaran gerakan buruh. Tentu sasaran pertama adalah Gereja sendiri. Kenyataannya banyak anggota Gereja bekerja sebagai buruh. Anggota Gereja diharapkan mempromosikan *bonum commune* dalam setiap gerakan buruh yang diikutinya.

Gerakan Kaum Buruh

Ada dua hal penting yang diperjuangkan oleh buruh, yaitu hak atas upah yang layak dan hak berorganisasi. Walaupun masalah ini yang muncul ke permukaan, bukan berarti tidak ada lagi masalah lain. Hanya saja gerakan ini tidak akan mampu menyentuh persoalan lainnya kalau kedua masalah ini belum tuntas.

Masalah Upah

Masalah buruh sepanjang sejarah adalah masalah hidup yang layak. Salah satu penentu layak tidaknya hidup seorang buruh adalah besar-kecilnya upah yang diterima. Buruh sudah memberikan tenaga maksimal, tetapi hidupnya hanya “menggali lubang tutup lubang saja”. Kondisi hidup buruh jauh berbeda dengan para pengusaha yang hanya menuntut kaidah keuntungan maksimal untuk menimbun bukit kekayaan. Buruh bekerja untuk mempertahankan hidupnya, sementara para pengusaha semakin rakus untuk menambah investasi. Kalau buruh menuntut penghidupan yang layak, maka hal ini menjadi kesempatan baik bagi pengusaha untuk menekan para penuntut tersebut. Majikan memakai kenyataan konkret yang suram sebagai alasan pemecatan, yaitu panjangnya antrean penganggur untuk menggantikan mereka. Panjangnya

³A. PIERES, “Redemptoris Missio”, *Concilium* 5 (1991) xiv.

⁴G. BAUM, “The Originality of Catholic Social Teaching”, *Concilium* 5 (1991) 62.

antrean itu menjadi indikasi betapa besarnya kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh para buruh.

Dapat kita lihat dengan jelas, adanya jurang pemisah yang pernah dicemaskan oleh Karl Marx. Terciptanya kesenjangan antara buruh yang hidup begitu keras dan miskin dengan para pemilik modal yang hidup enak dan berkelimpahan. Jurang yang lebih dalam lagi adalah antara kapasitas kerja yang dilakukan oleh buruh dengan kuantitas dan kualitas balas jasa yang diperolehnya. Orang tidak memperoleh hasil sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Ini adalah penjajahan, pemerasan, dan perbudakan.

Kenyataan seperti ini menyuburkan tindakan-tindakan kekerasan dalam dua arah. Pertama, kekerasan dan pemerasan dari pengusaha kepada para pekerja. Hak hidup layak buruh diabaikan. Kerja dan usaha manusia tidak dihargai. Tindakan ini mewarisi tindakan perbudakan yang sudah lama ditinggalkan. Kedua, kekerasan dan pemerasan dari buruh ke pengusaha. Para pekerja mengadakan unjuk rasa dan kadang menteror pengusaha, bahkan terhasut untuk merusak dan menjarah milik pengusaha dan milik umum. Tindakan ini menyuburkan tindakan anarkis. Tese-antitese-sintese (buruh-pengusaha-tanpa kelas/tanpa milik pribadi) yang pernah disodorkan oleh Marx secara non-formal menjelma dalam bentuk penjarahan, pencurian dan tindak kekerasan lainnya.⁵ Kekerasan yang terjadi dalam dua arah ini amat berbahaya, karena “gaya” ini bisa menjadi bagian hidup kalau sudah mendarah daging.

Banyaknya usaha dan perhatian dalam menuntut upah minimum, membuat buruh tidak pernah meningkatkan keterampilan, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Bahkan upah minimum yang seharusnya sesuai dengan prestasi dan lamanya bekerja, malah menjadi upah tertinggi. Buruh tidak pernah mendapat keuntungan perusahaan.⁶ Tuntutan kenaikan upah justru menjadi bumerang. Realisasi kenaikan upah bisa menimbulkan pengangguran yang lebih besar, apalagi perusahaan semakin bergerak dari padat karya ke padat modal. Tentu pengusaha akan lebih mudah mengelola modal dalam bentuk teknik dari pada mengkaryakan banyak buruh. Bagi pengusaha, mengorganisir modal tenaga manusia yang berbeda karakter dan banyak tuntutan, jauh lebih sulit dari pada mengelola modal dalam bentuk teknik.

Akibatnya ialah, buruh terperangkap dalam keterpurukan hidup. Mereka menjadi sarana komersialisasi. Pekerja menjadi objek pemerasan untuk memperoleh *income*, pekerja sendiri secara “suka rela” lembur. Pilihan lembur ini justru memasukkan diri pada perangkap penyakit. Orang sakit tidak bertenaga lagi untuk menutup kebutuhannya, karena kerja sudah menguras seluruh energi, sedangkan upah yang diperoleh sangat kecil. Gali lubang untuk tutup lubang lagi.

⁵B. KIESER, *Solidaritas, 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*, Yogyakarta 1992, 44-46.

⁶T. P. WIDIJANTO, “Pompa Organ di Gereja dan Buruh Indonesia”, *Kompas* (22 Juni 2002) 33.

Organisasi Buruh

Secara individu buruh sangat lemah untuk menuntut hidup layak. Berjuang sendiri sama dengan membenturkan kepala sendiri ke tembok. Kelemahan individu ini harus ditopang oleh organisasi yang sungguh komit pada kesejahteraan bersama. Membentuk sebuah organisasi tidaklah mudah. Masalahnya, organisasi sering dilihat oleh pengusaha sebagai lawan yang menggerogoti dan mengguncang usaha dan kuasanya. Di pihak lain ada organisasi yang melekatkan kepentingannya pada pemerintah dan pada pengusaha sendiri, sehingga organisasi tersebut menjadi penyambung lidah pengusaha kepada penguasa.

Pengusaha biasanya alergi kalau pekerja berorganisasi memperjuangkan hak mereka. Ada yang di-PHK secara sepihak, karena mereka aktif menuntut hak buruh. Dan buruh yang di-PHK sulit mendapat pekerjaan kemudian, karena perusahaan yang bergerak di bidang yang sama akan mem-*blacklist*-kan orang tersebut.

Untuk menekan gerakan buruh ada kalanya pengusaha mencari “keamanan” baik dari kalangan militer maupun dari preman secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Uang “keamanan” atau yang sering disebut biaya siluman harus ditanggung pengusaha yang jumlahnya kadang lebih besar daripada upah buruh. Secara tidak langsung pihak “keamanan” itu telah merampas hak para buruh.

Pengusaha yang seharusnya menjadi pelindung, malah menjadi lawan. Benteng “keamanan” para pengusaha menjadi musuh lapisan kedua. Semua pihak mengasah perlawanan yang menghilangkan rasa damai bagi semua pihak. Organisasi yang diharapkan mampu menampung aspirasi menjadi tumpul. Maka lahirlah kekerasan dan pengrusakan tatanan sosial dan sarana umum sebagai akumulasi dari emosi yang tertekan.

Beberapa Gagasan Ajaran Sosial Gereja Menyangkut Kaum Buruh

Perhatian Gereja atas masalah sosial khususnya mengenai buruh mulai terumus dengan baik dalam *Rerum Novarum*. Ide *Rerum Novarum* disempurnakan oleh ensiklik-ensiklik lain. Masalah buruh ditempatkan dalam koridor masalah sosial dan masalah kerja manusia yang bertanggungjawab dan adil.

Rerum Novarum

Kalau kita berbicara tentang ajaran sosial Gereja terutama tentang buruh, kita tidak bisa melewatkan ensiklik *Rerum Novarum*. Ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Leo XIII tahun 1891, yang memberi pandangan baru kepada Gereja tentang masalah sosial, khususnya masalah buruh. Tujuannya adalah “*a Christianizing of modern life and a modernizing of Christian life*”.⁷ Gerakan ini

⁷M. SCHÄFERS, “Rerum Novarum – The Result of Christian Social Movements ‘From Below’”, *Concilium* 5 (1991) 14.

datang dari bawah.⁸ Paus Leo XIII mengetahui bahwa kemajuan industri, di banyak daerah Eropa dan Amerika mengakibatkan banyak umat Katolik bekerja sebagai buruh dan mereka berusaha memajukan buruh dengan membentuk organisasi. Gerakan ini menjamur di luar lembaga Gereja. Waktu itu sedang bergulir cepat gerakan sosialis dan komunis yang menuntut penghapusan milik pribadi dan perjuangan kelas. Gerakan ini dilihat berbahaya bagi Gereja.⁹

Rerum Novarum untuk pertama kali secara prinsipal dan menyeluruh membahas masalah buruh, serta menguraikan pandangan Gereja mengenai persoalan sosial ini.¹⁰ Kemerdekaan kaum buruh mesti diusahakan, oleh karena itu ditegaskan perlunya campur tangan negara untuk melindungi buruh. Buruh mesti merasa aman bekerja dan memperoleh upah sebagai milik pribadi. Untuk memperjuangkan haknya, kepada buruh mesti diberi kemungkinan untuk bergabung dalam organisasi dan bila perlu mengadakan pemogokan.¹¹

Sesudah dokumen *Rerum Novarum* menyusul dokumen lain yang mengambil “roh” ensiklik ini untuk menindaklanjuti perhatian terhadap kaum buruh.¹²

Ide Radikal Ajaran Sosial Gereja

Gregory Baum meringkaskan tiga ide radikal dalam ajaran sosial gereja, yaitu: hidup sosial partisipatif, pilihan utama untuk orang miskin dan kerja sebagai budaya.¹³

Hidup Sosial Partisipatif

Ide ini ditekankan, karena Gereja tidak menghendaki individu sebagai partikel lepas yang menjalin kontrak untuk menjamin keamanan, kekayaan dan kebebasan sewenang-wenang. Karena itulah pada abad XIX para paus menolak pola hidup liberal, dan kurang berminat dengan demokrasi sosial. Namun pada akhir abad XX, Paus Yohanes Paulus II mendukung kebebasan sipil untuk berdemokrasi dengan menghidupi nilai-nilai Katolik, yang menekankan bahwa semua orang bertanggungjawab atas hidup sosialnya. Tanggungjawab tersebut bukan hanya pada kaum elit atau pemimpin, tetapi pada semua penduduk.¹⁴

⁸M. SCHÄFERS, “Rerum Novarum – The Result of Christian Social Movements ‘From Below’”, *Concilium* 5 (1991) 3-15.

⁹Perjuangan buruh untuk membela hak dibenarkan asal dalam pertimbangan etis, hukum dan hormat pada martabat manusia.

¹⁰B. KIESER, *Solidaritas, 100 tahun*, 55.

¹¹B. KIESER, “Iman dan Keadilan”, dalam *Ajaran Sosial Gereja, dari Rerum Novarum sampai dengan Centesimus Annus, Seri Forum LPPS XVIII*, Jakarta 1991, 12.

¹²Beberapa ensiklik yang menindaklanjuti ide Rerum Novarum, a.l: *Quadragesimo anno* (1931) oleh Paus Pius XI, *Octogesima Adveniensi* (1971) oleh Paus Paulus VI, *Centesimus Annus* (1991) oleh Paus Yohanes Paulus II; dan masih ada beberapa dokumen penting a.l: *Mater et Magistra* (1961) oleh Paus Yohanes XXIII, *Laborem Exercens* (1981) oleh Paus Yohanes Paulus II, *Sollicitudo Rei Socialis* (1987) oleh Paus Yohanes Paulus II, dan lain-lain.

¹³G. BAUM, “The Originality of Catholic Social Teaching”, *Concilium* 5 (1991) 55-62.

¹⁴Y. PAULUS II, *Centesimus Annus*, Roma 1991, 46.

Dalam konteks buruh, Paus Yohanes Paulus II dalam *Laborem Exercens*, mengatakan bahwa para pekerja berhak berpartisipasi dalam memutuskan proses kerja dan dalam penggunaan hal-hal yang mereka produksi. Dengan pola partisipatif ini pekerja menjadi subjek produksi, bukan objek.¹⁵

Pilihan Utama untuk Orang Miskin

Dengan ide ini, Gereja mendukung gerakan kaum buruh yang memperjuangkan keadilan melawan kekuasaan dan kekerasan yang menekan. Dukungan ini adalah bagian dari pilihan utama pada orang miskin. Tentu gerakan yang didukung oleh Gereja adalah gerakan yang berdasar pada *bonum commune*. Ketidakadilan sosial, mekanisme sosial politik yang hanya melahirkan penderitaan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan *bonum commune*.

Kerja sebagai Budaya

Ide ini jelas nyata dalam *Laborem Exercens* dengan tekanan bahwa manusia makhluk yang bekerja. Dengan bekerja manusia mengembangkan kemampuannya, untuk mengatasi kesulitan, merealisasikan diri dan menyesuaikan hidup dengan kehendak Allah. Manusia terbentuk oleh pekerjaan yang dilakukannya, karena itulah kerja menjadi bagian budaya. Paus Yohanes Paulus II mengadopsi defenisi kebudayaan dari pemahaman antropologis, sebagai “*set of institutions customs, values and ideas that define people’s relation to one another and express the common ethos, then labour is part of culture, in fact the principal part. If a society is to become just, responsible and participatory, reconstruction must begin with the economic order, especially the organisation of labour.*”¹⁶

Nilai Kerja

Nilai kerja merupakan poin penting dalam menyorot gerakan kaum buruh. Friedhelm Hengsbach menyarikan tiga dimensi nilai kerja manusia dalam ajaran sosial gereja, yaitu dimensi natural, dimensi personal, dan dimensi sosial.¹⁷

1. Kerja manusia memiliki dimensi natural dan human. Kerja membuat manusia *survive* dalam dunia yang menantang. Orang harus bekerja untuk memenangkan perjuangan harian.
2. Kerja manusia memiliki dimensi personal dan pengungkapan jati diri. Dengan bekerja manusia bukan hanya mentransformasi alam, tetapi juga dengannya manusia mencapai kepenuhan dirinya sebagai manusia. Karena itulah hasil dan proses kerja tidak bisa dipisahkan begitu saja dari pekerja

¹⁵Y. PAULUS II, *Laborem Exercens* 14, Roma 1981; Bdk. Y. PAULUS, *Sollicitudo Rei Socialis* 15, Roma 1987.

¹⁶G. BAUM, “The Originality of Catholic”, 61.

¹⁷F. HENGSBACH, “The Church and the Right to Work”, *Concilium* (1982) 43-44.

sendiri.¹⁸ “*Work is a basic dimension of human existence. But work needs to be humanizing a process of human self fulfilment*”¹⁹ “Dari situ lahir kewajiban untuk bekerja dengan setia, tetapi juga hak atas kerja bagi setiap orang.”²⁰

3. Kerja memiliki dimensi sosial. Manusia tidak mencapai kepenuhan hidupnya dengan mengisolasi diri, tetapi dalam pengalaman dan kesalingtergantungan dalam hidup sosial. Manusia yang berbeda kemampuan dan kepentingan berpadu menata hidup bersaudara. Kerja menjadi kunci esensial dalam hidup bersaudara.

Keadilan Sosial

Ide keadilan merupakan suatu konsep yang secara original dan universal hadir dalam kesadaran manusiawi yang bisa digunakan sebagai kriteria normatif. Thomas Aquino merumuskan keadilan sebagai suatu keutamaan, dengan kemauan tetap memberikan kepada seseorang apa yang menjadi miliknya.²¹ Dalam konteks keadilan khususnya keadilan sosial, dia pernah berpendapat bahwa orang miskin yang mencuri bukan tindakan pencurian, tetapi suatu tindakan pengambilan kembali apa yang menjadi miliknya.²²

Masalah yang dilihat oleh *Rerum Novarum* adalah masalah keadilan. Umat katolik yang menjadi buruh, bekerja tidak di atas “tanahnya”, memakai yang tidak miliknya, dan hasilnya pun untuk orang lain. Yang mereka peroleh adalah upah yang tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitas pekerjaan mereka.²³ Keadilan dalam ajaran sosial Gereja menjawab masalah ini dengan menyentuh hidup pribadi dan sosial. Adil berarti semua orang yang ikut bekerja hendaknya diberi juga tanggungjawab dalam perusahaan, sehingga mereka memiliki sebagian dari hasil perusahaan buah kerjanya dengan pembagian yang adil, ditentukan menurut kebutuhan buruh dan kemampuan perusahaan.²⁴

Keadilan ini menuntut setiap orang baik buruh maupun pengusaha menunaikan tanggungjawab dan kewajiban. Untuk itulah Paus Leo XIII mengatakan, “Masalah kaum buruh selesai, asal semua dan masing-masing menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga setiap orang mendapat haknya: para buruh menjalankan kewajiban mereka menurut kontrak kerja, tanpa merusak perusahaan – para majikan tidak memperlakukan buruh sebagai budak; khususnya kepada buruh perlu diberikan upah yang cukup untuk hidup

¹⁸Bdk. Y. PAULUS II, *Laborem Exercens* 16,27; Bdk, *Dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes*, 67.

¹⁹J.M. DIEZ-ALEGRIA, “Ownership and Labour. The Development of Papal Teaching”, *Concilium* 5 (1991) 22.

²⁰*Dokumen Konsili Vatikan II, “Gaudium et Spes”*, 67.

²¹Pendapat Thomas Aquino dalam Mauro Cozzoli, “Giustizia” dalam *Nuovo Dizionario di Teologia Morale*, Milano, San Paolo 1994, 500.

²²Pendapat Thomas Aquino dalam Enrico Chiavacci, “Equalità, Giustizia, Solidarietà, dalam *Rivista di Teologia Morale* 117, Roma 1998, 38.

²³B. KIESER, “Iman dan Keadilan”, dalam *Ajaran Sosial Gereja, dari Rerum Novarum sampai dengan Centesimus Annus*, LPPS KWI, Jakarta 1991, 11.

²⁴PIUS XI, *Quadragesimo Anno* 66, Roma 1931, 71-75.

layak...”²⁵ Konsep ini akan mengikis sikap sebagian pekerja dan pengusaha yang tahu hanya menuntut hak, tetapi kurang melaksanakan kewajibannya.

Buruh sebagai Partner

Kenyataan gerakan buruh berupah tinggi mulai di Amerika Serikat. Mungkin hal ini bukan pengaruh langsung dari ajaran sosial Gereja, namun nilai yang diperjuangkan oleh ajaran sosial Gereja hidup di sana. Buruh boleh memiliki saham perusahaan tempatnya bekerja, dengan demikian mereka berhak memperoleh deviden. Hidup buruh makin sejahtera. Dalam situasi ini pengusaha dan buruh saling menguntungkan dan menghidupkan. Para buruh menjadi partner pengusaha, sehingga para buruh tersebut semakin berkreasi dan berprestasi.

Kalau buruh sebagai partner, maka keterlibatan mereka perlu diperhitungkan dalam menentukan kebijakan. Keputusan ada di tangan bersama dan menjawab aspirasi bersama (pribadi buruh yang dibantu oleh serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah). Keputusan dan kebijakan upah mesti memperhatikan perekonomian setempat dan situasi faktual perusahaan. Kalau ini terjadi semua pihak mengutamakan kepentingan bersama. Dan sebaliknya kalau setiap orang atau setiap pihak mengutamakan kepentingan masing-masing yang lahir adalah masalah. Kalau masalah memuncak, hal-hal baik yang pernah dikerjakan akan hancur.

Pekerjaan seyogianya menyatukan dan merukunkan orang.²⁶ Maka kekayaan yang diperoleh dari hasil kerja mesti memiliki dimensi sosial. Ajaran sosial Gereja menekankan pemilikan saham bersama. Dengan ini pekerja merasa memiliki. Rasa ini akan menumbuhkan komitmen bersama. Tempat kerja mejadi tempat memperbaiki hidup. Maka secara bersama juga pekerja berusaha memperbaiki dan membela perusahaan tempat mereka bekerja.²⁷

Sikap ini akan mengantar orang untuk memprioritaskan kepentingan umum.²⁸ Gereja membantu gerakan buruh dalam memperjuangkan keadilan melawan pemegang kekuasaan yang menekan, tetapi bukan hanya demi mencari perkembangan kondisi material, tetapi khususnya membentuk *bonum commune*, agar tercipta hidup etis dan spiritual yang layak. Ketidakadilan dalam mekanisme politik yang menekan bukan hanya menimbulkan penderitaan pada korban sendiri, tetapi juga merusak *bonum commune*.²⁹

Bonum Commune sebagai Sasaran Gerakan Kaum Buruh

Gaudium et Spes merumuskan *bonum commune* begini, “Keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan

²⁵B. KIESER, “Iman dan Keadilan”, 12.

²⁶Y. PAULUS II, *Laborem Exercens* 20.

²⁷Y. PAULUS II, *Laborem Exercens* 20, 14-15; *Sollicitudo Rei Socialis* 38-39.

²⁸*Dokumen Konsili Vatikan II*, “*Gaudium et Spes*” 75.

²⁹Y. PAULUS II, *Sollicitudo Rei Socialis*, 36-37.

lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Setiap kelompok harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi-aspirasi kelompok-kelompok lain yang wajar, bahkan kesejahteraan umum segenap keluarga manusia.”³⁰

Dalam mengartikan *bonum commune*, teologi Katolik memiliki dua tendensi. Pertama, menggarisbawahi *bonum commune* sebagai suatu realitas yang kepadanya semua dipanggil untuk berpartisipasi. Partisipasi ini bersifat human dan tidak terbatas pada level ekonomis.³¹ Kedua, *bonum commune* menghasilkan kebaikan anggota hidup bersama. Dalam konsep ini individu tidak bertentangan dengan komunitas, tetapi martabat setiap pribadi dihargai dalam komunitas. *Bonum commune* adalah suatu teori dan pengalaman yang mendamaikan individualisme ekstrim dan kolektivisme ekstrim. *Bonum commune* tidak direduksi pada opini mayoritas.³²

Jadi *bonum commune* menekankan motif kerja sama dan keadilan sosial yang memperhatikan poin-poin berikut.

1. Hak azasi harus mendapat prioritas. Keadilan sosial berarti memberikan kepada setiap orang *proprie necessità*. Ini menandakan secara sosial orang hidup dalam berbeda konteks, maka hak sosial itu tergantung dari konteks sosial.³³
2. Setiap persona diakui sebagai anggota komunitas yang signifikan, sehingga orang bisa hidup dalam komunitas berbeda dalam kedamaian dan ketenteraman sosial.

Hidup dalam *bonum commune*, pribadi bukan sebagai pribadi lepas, tetapi orang yang mengalami hak dan kewajiban dalam pertalian solidaritas. Tujuan jangka pendek gerakan sosial adalah *bonum commune*, tujuan akhir dan esensial adalah persona. *Bonum commune* mendukung kebaikan personal yang membela kebaikan untuk semua.³⁴

Memperjuangkan kepentingan sendiri adalah legal, tetapi masalah moral akan muncul kalau orang berkeras akan kepentingannya. Hal itu dapat merusak tatanan dan tenunan hidup sosial. Maka kalau ada tuntutan hak dari buruh sebaiknya tuntutan itu berhubungan dengan kebaikan menyeluruh. Dengan demikian dijamin ketenteraman sosial sebagai “*locus*” memecahkan kesulitan bersama. Tentu ada masalah antara hak legal dengan hak moral. Dalam konflik ini perlu diperhatikan kebebasan individu dalam arti benar, yaitu kebebasan yang menuntun orang pada *bonum commune*.³⁵

Jadi gerakan buruh untuk memperjuangkan upah yang wajar, agar mereka hidup layak serta untuk memperjuangkan aspirasi dalam organisasi merupakan

³⁰*Gaudium et Spes* 26.

³¹*Gaudium et Spes* 32; YOHANES XXIII, *Mater et Magistra* 59, Roma 1961, 59; *Sollicitudo Rei Socialis* 38.

³²R. GALLAGHER, *Diritti Umani, Giustizia Sociale, Bene Commune*, Roma 1998, 51.

³³R. GALLAGHER, *Diritti Umani, Giustizia Sociale, Bene Commune*, Roma 1998, 43.

³⁴G. GONELLA, *Principi di un Ordine Sociale*, Città del Vaticano 1944, 78-83.

³⁵*Gaudium et Spes*, 74.

bagian perubahan yang mengarah pada *bonum commune*. Dengan bekerja semua orang termasuk buruh membangun budaya konstruktif serta mengikis sikap destruktif dan kekerasan. Buruh adalah bagian masyarakat yang turut menentukan kesejahteraan umum. Menyepelkan tuntutan mereka berarti menyepelkan kesejahteraan bersama. *Bonum commune* mesti menjadi sasaran yang real, sehingga menjadi suatu realitas bermuatan solidaritas yang tanggap atas kebutuhan orang lain.³⁶ Menata *bonum commune* adalah keyakinan dan praktek tua Gereja, “Ia (Gereja) diwajibkan oleh panggilannya- dia sendiri, para petugasnya dan setiap anggotanya- meringankan kemelaratan penderitaan, baik yang jauh maupun dekat, bukan hanya dari ‘kelimpahannya’ melainkan juga dari ‘kekurangannya’”.³⁷

Penutup

“Bumi sanggup membutuhkan penghuninya”³⁸, demikian menurut Pontificio Consiglio “Cor Unum”. Kalau ada orang menderita, karena tidak terpenuhi kebutuhannya, berarti ada masalah dalam kerja. Ada beberapa penyebabnya: mungkin orang tidak bekerja dengan baik mengolah bumi, atau kemungkinan lain, orang bekerja, tetapi dia terbentur dengan ketidakadilan. Situasi seperti ini dikategorikan oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai “Dunia Keempat”, di mana banyak orang menderita di tengah orang banyak berkecukupan dan berpenghasilan tinggi.³⁹

Gerakan buruh yang terjadi dewasa ini mau menjawab masalah ketidakadilan dalam kerja. Menurut ajaran sosial Gereja, gerakan mereka ini adalah gerakan kita bersama, khususnya di era industrialisasi sekarang. Buruh mesti menjadi partner pengusaha dan penguasa. Sebagai partner, aspirasi mereka perlu ditanggapi dan hak untuk hidup layak lebih mendesak lagi diurus. Kriteria hidup layak ditentukan oleh beberapa unsur, misalnya, profesi, konteks dan fakta kehidupan sosial.

Agar gerakan buruh menyasar ke *bonum commune*, gerakan mereka tidak bisa eksklusif, mesti inklusif, berdialog dan berinteraksi dengan gerakan masyarakat yang sedang berubah. Orang yang makin peka atas haknya adalah hasil perkembangan budaya. Perkembangan ini akan memungkinkan tanggung jawab dan kewajiban serta solidaritas bertumbuh bersama.

³⁶Y. PAULUS II, *Centessimus Annus*, Roma 1991.

³⁷Y. PAULUS II, *Sollicitudo Rei Socialis*, 31.

³⁸Pontificio Consiglio “Cor Unum”, *La Fame nel Mondo, Una Sfida per Tutti lo Sviluppo Dolidale*, Bologna 1996, 26.

³⁹Y. PAULUS II, *Sollicitudo Rei*, 14, khususnya catatan kaki no. 31.

Daftar Pustaka

Dokumen Gereja:

- LEO XIII, *Rerum Novarum*, Roma 1891.
PIUS XI, *Quadragesimo Anno*, Roma 1931.
YOHANES XXIII, *Mater et Magistra*, Roma 1961.
Dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes.
YOHANES PAULUS II, *Laborem Exercens*, Roma 1981.
YOHANES PAULUS II, *Sollicitudo Rei Socialis*, Roma 1987.
YOHANES PAULUS II, *Centesimus Annus*, Roma 1991.
Pontificio Consiglio “Cor Unum”, *La Fame nel Mondo, Una Sfida per Tutti lo Sviluppo Solidale*, Dehoniane-Bologna 1996, 26.

Komentar atas Dokumen Gereja:

- COLEMAN, J. – BAUM, G., ed., *Rerum Novarum. One Hundred Years of Catholic Social Teaching, Concilium 5*, London: SCM Press 1991.
KIESER B., *Solidaritas, 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*, Yogyakarta: Kanisius 1992.
LPPS-KWI, *Ajaran Sosial Gereja, dari Rerum Novarum sampai dengan Centesimus Annus, Seri Forum LLPS 18*, Jakarta 1991.

Buku dan Artikel Pendukung:

- CHIAVACCI, E., “Equalità, Giustizia, Solidarietà”, *Rivista di Teologia Morale* 117, Roma 1998.
COZOLLI, M., “Giustizia” dalam *Nuovo Dizionario di Teologia Morale*, Milano: San Paolo 1994.
GALLAGHER, R., *Diritti Umani, Giustizia Sociale, Bene Commune*, Roma: Alfonsiana 1998.
GONELLA, G., *Principi di un Ordine Sociale*, Città del Vaticano: Civitas Gentium 1944.
POHIER, J. – MIETH D., ed., *Unemployment and the Right to Work, Concilium*, Edinburg: T. & T. Clark 1982.
PURWANTARI, B.I., “Jajak Pendapat ‘Kompas’, Upah Buruh Harus Naik”, *Kompas* (13 Januari 2002).
SYAIFULLAH, M. – NASIR M., “Ketika Buruh Bandung Melawan”, *Kompas* (22 Juni 2002).
WIDIJANTO, T.P., “Pompa Organ di Gereja dan Buruh Indonesia”, *Kompas* (22 Juni 2002).